

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan yang dipilih peneliti untuk mengkaji peristiwa ini adalah kualitatif. Alasan peneliti memilih pendekatan ini karena pendekatan kualitatif cocok untuk membahas *framing* berita di media. Penelitian kualitatif tidak dibatasi oleh objektivitas sehingga mampu menggali fenomena penelitian lebih dalam dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan pemahaman yang tidak dapat dicapai melalui metode statistik atau pengukuran kuantitatif. Penelitian ini menggali dan mendalami fenomena sosial atau lingkungan sosial dengan memperhatikan pelaku, peristiwa, lokasi, dan konteks waktu (Djunaidi Ghony & Almanshur, 2017, p. 25).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan media sebagai subjeknya, metode yang dipilih peneliti adalah *framing*. Fenomena yang diulas berupa bingkai pemberitaan Revisi UU Pilkada pada media *online* Detik.com dan Tempo.co. Peneliti memilih metode *framing* karena seperti yang dinyatakan oleh Eriyanto, analisis *framing* digunakan untuk memahami bagaimana media membentuk realitas, termasuk metode dan teknik yang diterapkan dalam penyajian peristiwa (Eriyanto, 2015, p. 3).

### III.2. Metode

Penelitian ini akan menerapkan metode analisis *framing* berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Robert Entman. Pada metode analisis *framing* Entman ini, instrumen *framing* terbagi menjadi empat aspek penting diantaranya adalah : *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Pada dasarnya struktur-struktur tersebut mengarah pada pemberian arti, penjelasan evaluasi dan saran dalam suatu pembicaraan untuk menyoroti sudut pandang khusus terhadap peristiwa yang akan diselidiki. (Eriyanto, 2015, pp. 223–224).

*Framing* berperan sangat penting untuk membantu peneliti untuk melihat hasil pemikiran dan konstruksi realitas oleh wartawan media. Pemberitaan media tentang Revisi UU Pilkada berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat. Media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga membingkai isu yang memengaruhi opini publik. Cara *framing* media dalam isu ini dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menilai keputusan politik, menjadikannya jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan menggunakan konsep analisis *framing* menurut Robert Entman, peneliti dapat menghubungkan cara pembingkaiian pemberitaan mengenai Revisi UU Pilkada pada media *online* Detik.com dan Tempo.co untuk melihat bagaimana kedua media tersebut menyajikan isu ini.

### III.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang dipilih peneliti adalah media *online* Detik.com dengan mengambil 3 berita dari 18 berita, dan Tempo.co dengan mengambil 3 berita dari 21 berita. Peneliti memilih dua media *online* tersebut karena menurut peneliti, dua media ini mendukung peneliti dalam mencari informasi untuk menjawab dari objek yaitu mengenai *framing* pemberitaan Revisi UU Pilkada.

**Tabel III.3.1 List Berita Revisi UU Pilkada di Detik.com**

| No. | Tanggal/Waktu                | Judul Berita                                                                  |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 21 Agustus 2024<br>12:45 WIB | Warning Keras Ahli Hukum-Aktivis Jika Revisi UU Pilkada Abaikan Putusan MK    |
| 2.  | 21 Agustus 2024<br>14:13 WIB | Wanti-wanti Pakar Jika Revisi UU Pilkada Jadi Manuver Putusan MK: Bisa Chaos  |
| 3.  | 21 Agustus 2024<br>18:17 WIB | Pakar Pertanyakan Rapat ‘Kilat’ Revisi UU Pilkada: Mana Aspirasi Publiknya?   |
| 4.  | 22 Agustus 2024<br>10:34 WIB | Fisipol UGM Izinkan Mahasiswa Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada Disahkan |
| 5.  | 22 Agustus 2024<br>11:06 WIB | Fisipol UGM Liburkan Kuliah Demi Mahasiswa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada       |
| 6.  | 22 Agustus 2024<br>12:53 WIB | Massa Gelar Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Depan Gedung DPRD Jabar           |
| 7.  | 22 Agustus 2024<br>14:42 WIB | Bahlil soal Revisi UU Pilkada: Saya Baru Bangun, Belum Rapat Sama Fraksi      |
| 8.  | 22 Agustus 2024<br>15:28 WIB | Soal Revisi UU Pilkada, Bahlil: Saya Baru Bangun                              |
| 9.  | 23 Agustus 2024<br>07:23 WIB | Penegasan DPR soal Revisi UU Pilkada Batal dan Putusan MK Berlaku             |
| 10. | 23 Agustus 2024<br>08:09 WIB | Penegasan KPU: Pendaftaran dan Penetapan Pilkada 2024 Ikuti Putusan MK        |
| 11. | 23 Agustus 2024<br>08:41 WIB | DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, MAKI: Jangan Manuver Lagi                     |
| 12. | 23 Agustus 2024<br>11:45 WIB | Akhir Drama Upaya DPR Revisi UU Pilkada yang Menuai Protes                    |
| 13. | 23 Agustus 2024<br>13:06 WIB | Menkumham soal RUU Pilkada Batal: Pernyataan DPR Tegas Sekali Semalam         |
| 14. | 23 Agustus 2024<br>14:32 WIB | Revisi UU Pilkada Batal, Pakar Hukum UII Ingatkan Manuver di Menit Akhir      |
| 15. | 23 Agustus 2024<br>21:57 WIB | RK soal Revisi UU Pilkada Batal: Makin Banyak Berpartisipasi, Makin Bagus     |

|     |                              |                                                                         |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16. | 23 Agustus 2024<br>23:20 WIB | Revisi UU Pilkada Batal, Zulhas: Kalau Mahasiswa Bicara, Pasti Didengar |
| 17. | 24 Agustus 2024<br>11:00 WIB | Revisi UU Pilkada Tak Belanjut, Awiek: Periode DPR Mau Habis            |
| 18. | 26 Agustus 2024<br>11:01 WIB | Pemprov DKI Bina Puluhan Pelajar yang Ikut Demo Revisi UU Pilkada       |

(Sumber: Data Olahan Peneliti)

**Tabel III.3.2 List Berita Revisi UU Pilkada di Tempo.co**

| <b>No.</b> | <b>Tanggal/Waktu</b>         | <b>Judul Berita</b>                                                                                                |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | 21 Agustus 2024<br>15:35 WIB | Istana Sebut Pemerintah Akan Ikuti Hasil Pembahasan Revisi UU Pilkada di DPR                                       |
| 2.         | 21 Agustus 2024<br>19:00 WIB | Baleg DPR Setuju Revisi UU Pilkada Disahkan                                                                        |
| 3.         | 22 Agustus 2024<br>08:21 WIB | Pakar Hukum Tata Negara: Revisi UU Pilkada Batal Demi Hukum                                                        |
| 4.         | 22 Agustus 2024<br>10:20 WIB | Breaking News: Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda                                                      |
| 5.         | 22 Agustus 2024<br>11:03 WIB | ICW Kritik RUU Pilkada Dibahas Kilat: Publik Layak Marah Terhadap Jokowi                                           |
| 6.         | 22 Agustus 2024<br>17:34 WIB | Istana Sebut Manuver Jokowi di Balik Revisi UU Pilkada Hanya Rumor                                                 |
| 7.         | 22 Agustus 2024<br>19:15 WIB | Dasco Klaim DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada                                                              |
| 8.         | 22 Agustus 2024<br>19:59 WIB | Setujui Revisi UU Pilkada Disahkan, Berikut Kewenangan Baleg DPR                                                   |
| 9.         | 22 Agustus 2024<br>21:26 WIB | Rapat Paripurna DPR akan Mengesahkan Revisi UU Pilkada Hari Ini, Siasat Busuk Menjegal Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 10.        | 23 Agustus 2024<br>06:16 WIB | Marak Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Politikus PDIP: Rakyat Ingin Demokrasi Ditegakkan                              |
| 11.        | 23 Agustus 2024<br>10:12 WIB | Singgung Revisi UU Pilkada, Mahfud Md: Itu Hanya Upaya Loloskan Kaesang                                            |
| 12.        | 23 Agustus 2024<br>13:36 WIB | Menkumham Sebut Pemerintah Akan Ikuti DPR Setelah Pengesahan RUU Pilkada Batal                                     |
| 13.        | 23 Agustus 2024<br>16:41 WIB | Peringatan Darurat: Batalkan Revisi UU Pilkada dan Aksi Represif Polisi                                            |
| 14.        | 23 Agustus 2024<br>18:21 WIB | Pernyataan Lengkap DPR Soal Batalnya Pengesahan RUU Pilkada                                                        |
| 15.        | 23 Agustus 2024<br>20:49 WIB | Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Peneliti LSJ UGM: Hati-hati dengan Perpu Anulir Putusan MK                   |
| 16.        | 23 Agustus 2024<br>21:38 WIB | Penolakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada yang Melawan Putusan MK Meluas, Menolak Politik Dinasti Jokowi  |

|     |                              |                                                                                    |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | 24 Agustus 2024<br>11:38 WIB | Ridwan Kamil Mengaku Senang Revisi UU Pilkada Batal Disahkan                       |
| 18. | 24 Agustus 2024<br>12:00 WIB | Ramai Media Asing Sorot Pemerintah Indonesia atas Polemik Revisi UU Pilkada        |
| 19. | 24 Agustus 2024<br>17:32 WIB | Awalnya Dukung Revisi UU Pilkada, Kini Sejumlah Parpol KIM Bilang Ikuti Putusan MK |
| 20. | 27 Agustus 2024<br>20:23 WIB | Jokowi Puji DPR Kebut Revisi UU Pilkada: Terapkan ke RUU Perampasan Aset           |
| 21. | 31 Agustus 2024<br>06:35 WIB | DPR Tak Jadi Sahkan Revisi UU Pilkada, BEM KM UGM: Itu Kemenangan Kecil            |

(Sumber: Data Olahan Peneliti)

#### III.4. Unit Analisis

Subjek yang dipilih peneliti adalah pemberitaan pada media *online* Detik.com dan Tempo.co. Peneliti memilih dua media *online* tersebut karena menurut penulis, kedua media ini mendukung peneliti dalam mencari informasi untuk menjawab dari objek yaitu mengenai *framing* pemberitaan Revisi UU Pilkada.

**Tabel III.4 Subjek Berita Detik.com dan Tempo.co**

| No. | Topik                                                      | Judul Berita Detik.com                                                            | Judul Berita Tempo.co                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pandangan Ahli Hukum terhadap Revisi UU Pilkada            | <i>Warning</i> Keras Ahli Hukum-Aktivis Jika Revisi UU Pilkada Abaikan Putusan MK | Pakar Hukum Tata Negara: Revisi UU Pilkada Batal Demi Hukum                           |
| 2.  | <i>Framing</i> terhadap Pembahasan Kilat Revisi UU Pilkada | Pakar Pertanyakan Rapat ‘Kilat’ Revisi UU Pilkada: Mana Aspirasi Publiknya?       | ICW Kritik RUU Pilkada Dibahas Kilat: Publik Layak Marah Terhadap Jokowi              |
| 3.  | Reaksi Publik dan Demonstrasi terhadap Revisi UU Pilkada   | Fisipol UGM Izinkan Mahasiswa Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada Disahkan     | Marak Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Politikus PDIP: Rakyat Ingin Demokrasi Ditegakkan |

(Sumber: Data Olahan Peneliti)

Tiga berita dari Detik.com dan Tempo.co dipilih karena masing-masing media menyajikan perspektif yang berbeda tentang revisi UU Pilkada melalui tiga topik utama. Topik pandangan ahli hukum memperingatkan risiko jika putusan MK diabaikan, *framing* terhadap pembahasan kilat Revisi UU Pilkada menyoroti minimnya transparansi dan partisipasi publik, yang terakhir reaksi publik dan demonstrasi memperlihatkan dukungan terhadap demonstrasi sebagai wujud aspirasi demokrasi. Ketiga Topik ini menyediakan dasar yang kaya untuk analisis *framing* pemberitaan Revisi UU Pilkada pada media *online* Detik.com dan Tempo.co.

### **III.5. Teknik Pengumpulan Data**

Observasi dan dokumentasi teknik ini bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai bentuk berita dalam media *online* Detik.com dan Tempo.co ketika menyajikan berita mengenai Revisi UU Pilkada.

### **III.6. Teknik Analisis Data**

Menganalisis pemberitaan terkait pemberitaan tentang pemberitaan Revisi UU Pilkada di media *online* dengan metode penelitian menggunakan alat analisis *framing*. Peneliti akan menganalisis kerangka berdasarkan model konsep analisis *framing* dari Robert N. Entman dengan gambaran luas tentang bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandai oleh media *online* Detik.com dan Tempo.co.

**Tabel III. 5 Kerangka Analisis *Framing* Robert N. Entman di Tempo.co**

| <b>JUDUL: “ICW Kritik RUU Pilkada Dibahas Kilat: Publik Layak Marah Terhadap Jokowi”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isi Kutipan Berita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| <b><i>Define Problems (Pendefinisian Masalah)</i></b><br><br>"Pembahasan RUU Pilkada di Panja Baleg ini dilakukan secepat kilat hanya dalam tujuh jam."<br>"Publik layak marah terhadap Jokowi sebagai aktor utama revisi UU Pilkada di DPR,"<br>"Menguntungkan individu atau kelompok tertentu adalah bentuk korupsi kebijakan."                                                                                                                                                         | Korupsi kebijakan demi menguntungkan kelompok tertentu.                                                                                      |
| <b><i>Diagnose Causes (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)</i></b><br><br>"Baleg mensiasati putusan itu dalam pembahasannya delapan fraksi legislator tersebut menyepakati usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih."<br>"Padahal rencananya, pelantikan Pilkada saat masih dibahas dalam PKPU bakal dibuat secara serentak."<br>"Sudah jelas revisi bertujuan untuk menguntungkan dinasti Jokowi dan kroninya," | Revisi UU Pilkada didorong oleh kepentingan untuk memperkuat dinasti politik, dengan manipulasi aturan usia calon gubernur.                  |
| <b><i>Make Moral Judgement (Keputusan Nilai Moral)</i></b><br><br>"Publik tidak bisa dibodoh-bodohi."<br>"Menguntungkan individu atau kelompok tertentu adalah bentuk korupsi kebijakan."<br>"Publik jangan lupa daftar panjang keculasan Joko Widodo,"                                                                                                                                                                                                                                   | Kebijakan yang mendukung kelompok tertentu mencerminkan korupsi dan menguntungkan kepentingan pribadi Jokowi.                                |
| <b><i>Treatment Recommendation (Hasil Penyelesaian)</i></b><br><br>"Pembahasan di DPR harus segera dihentikan,"<br>"Publik layak marah terhadap Jokowi sebagai aktor utama revisi UU Pilkada di DPR."                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR harus dihentikan segera, mengingat publik berhak marah terhadap Jokowi sebagai aktor utama dibalikannya. |

(Sumber: Data Olahan Peneliti)